



REPDEM KOTA YOGYA BERI ADVOKASI

Ratusan Warga Miskin Diajukan Masuk DTKS

YOGYA (KR) - Sekitar 100 warga miskin mengakses layanan advokasi yang diberikan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Yogya. Advokasi tersebut untuk membantu proses pengajuan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Repdem Kota Yogya Yogie Prasetyo, mengungkapkan warga miskin berhak atas program kesejahteraan sosial, bantuan serta pemberdayaan dari pemerintah. "Program-program afirmatif tersebut saat ini mengacu pada DTKS yang menjadi data induk. Sehingga atas banyaknya keresahan warga miskin yang belum masuk dalam DTKS, maka kami buka pos advokasi," katanya, Rabu (8/2).

Layanan advokasi dilakukan di Pos Ronda RT 21 RW 05 Kampung Terban. Pihaknya pun ber-

hasil mendampingi sekitar 100 warga untuk dapat mendaftarkan diri secara mandiri. Ratusan warga tersebut mendatangi posko karena kesulitan dalam mengunggah data seperti data identitas diri serta foto diri di depan rumah ke dalam link.

"Pemerintah sudah meluncurkan sistem yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun ketika masyarakat mengalami kesulitan, maka kami hadir membantu," tandasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem Antonius Fokki Ardiyanto, mengapresiasi

gerakan tersebut. Dirinya yang berdomisili di Kota Yogya menilai, advokasi terhadap warga miskin agar bisa masuk dalam DTKS sesuai dengan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kader partai memang harus turun ke lapangan guna merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. "Gerakan itu jelas membantu. Tidak jarang warga miskin yang tidak memiliki telepon seluler. Bahkan sudah memiliki namun tidak mendukung untuk bisa mendaftarkan secara mandiri," ungkapnya.

Diakuinya, kendati Kota Yogya sudah memiliki program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) namun data tersebut juga harus mengacu pada DTKS. Oleh karena itu warga miskin yang belum masuk dalam DTKS maka tidak akan

terjaring dalam verifikasi calon penerima KSJPS.

"DTKS itu seperti induknya data. Pemerintah dalam mengulirkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan beragam bantuan lain, mengacu ke DTKS. Sedangkan Pemkot Yogya yang lebih spesifik dengan KSJPS yang diwujudkan melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), mulai tahun ini juga mengacu DTKS," urainya.

Oleh karena itu dirinya berharap semua warga miskin termasuk rentan miskin yang perlu dibantu, bisa diusulkan agar masuk ke dalam DTKS. Fokki juga mendesak agar instansi terkait baik kelurahan, kemantren serta dinas turut serta pro aktif mengusulkan warganya karena semua data bantuan sosial sudah terpusat. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005